

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi di setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau sering disebut *good governance*. Pemerintah yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk mengemban negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dalam rangka peningkatan perekonomian suatu daerah, salah satu yang harus dicapai adalah kinerja pemerintah yang baik. Kinerja atau *performance* yang berarti hasil pekerjaan atau prestasi kerja. Namun perlu dipahami bahwa kinerja itu bukan sekedar hasil pekerjaan atau prestasi kerja, tetapi juga mencakup bagaimana proses pekerjaan itu berlangsung. (Wibowo 2014:7)

Kinerja pemerintah saat ini sering menjadi sorotan publik. Masyarakat yang menerima pelayanan dari instansi pemerintah mulai mempertanyakan kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelakuan publik. Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. (BPPK Depkeu, 2014). Salah satu fokus kinerja instansi pemerintah yang paling penting adalah kinerja keuangan.

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012:2).

Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Halim, 2012:24). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu memperbaiki kinerja pemerintah, membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, dan mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. (Mardiasmo, 2009)

Indra Bastian (2010:267) menyatakan bahwa indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkatan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan elemen-elemen indikator kinerja. Elemen indikator kinerja terdiri atas lima elemen, yaitu: (1) Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. (2) Indikator Proses (process) rambu yang dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi. (3) Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau nonfisik. (4) Indikator (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).(5)Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir pelaksanaan kegiatan.

Fenomena yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang terjadi di Pemerintah Kota Cimahi yaitu penyerapan anggaran di Kota Cimahi dinilai rendah. Kementerian Keuangan mencatat Pemerintah Kota Cimahi sebagai pemerintah kota yang mempunyai dana idle di bank nasional dan bank daerah hingga Juni 2015. Pemerintah Kota Cimahi termasuk dalam lima pemerintah kota yang mengendapkan dana paling rendah akibat rendahnya penyerapan anggaran. Akibat dari banyaknya dana yang menganggur di bank, Pemerintah Pusat sudah siapkan sanksi. Serapan anggaran yang rendah ini dinilai akibat pemda malas memakai uang yang telah di transfer pemerintah pusat ke daerah baik berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengamat Pemerintahan Kota Cimahi, Kardin Panjaitan menyebutkan, APBD Kota Cimahi lebih kurang Rp. 1,2 Triliun. Hingga saat ini anggaran baru terserap lebih kurang 55 persen. Ia menyampaikan Pemkot Cimahi seharusnya aktif menyerap anggaran melalui program yang telah direncanakan, jangan lamban bekerja sehingga menimbulkan opini negatif. Sedangkan menurut Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi Chanifah mengatakan, penyerapan anggaran akan dimaksimalkan dan ia optimis silpa tahun ini akan berkurang.

<http://m.inilahkoran.com/berita/bandung/46539/penyerapan-anggaran-kota-cimahi-masih-rendah>

Dari fenomena tersebut berkaitan dengan dimensi yang dikemukakan oleh Indra Bastian yaitu tidak sesuai dengan dimensi masukan yaitu berkenaan dengan penggunaan sumber dana yang belum maksimal untuk melaksanakan kegiatan, sehingga tidak sesuai dengan rumusan proses kegiatan yang telah dibuat dan juga tidak sesuai dengan dimensi keluaran dimana kegiatan tersebut belum terlaksana sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparatur negara, menimbulkan persepsi aparatur terhadap kinerja layanan publik. Persepsi dari masing-masing aparatur digunakan sebagai acuan untuk menilai efektifitas dari kinerja yang dilakukan selama ini. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Natak Riswanto (2016) menyatakan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas yang dilakukan secara baik, sesuai, dipertanggungjawabkan dan diawasi dalam prosesnya maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah adalah dengan menyampaikan informasi

laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan tersebut diharapkan dapat dikelola dengan baik, transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Dalam hal ini, yang paling pokok adalah pertanggungjawaban keuangan yaitu sebagai upaya nyata dan niat baik pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang hasilnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. (Halim, 2012)

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. (Riantiarno & Azlina 2011)

Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266 pasal 16 tahun 2015 tentang Peningkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa berdasarkan kelompok peringkat masing-masing daerah sebagai berikut: a. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 93,75 sampai dengan 100 diberikan peringkat AA+ (Sangat Baik tingkat I); b. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 87,50 sampai dengan kurang dari 93,75 diberikan peringkat AA (Sangat Baik tingkat II); c. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 81,25 sampai dengan kurang dari 87,50 diberikan peringkat AA- (Sangat Baik tingkat III); d. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 75,00 sampai dengan kurang dari 81,25 diberikan peringkat BB+ (Baik tingkat I); e. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 68,75 sampai dengan kurang dari 75,00 diberikan peringkat BB (Baik tingkat II); f. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 62,50 sampai dengan kurang dari 68,75 diberikan peringkat BB- (Baik tingkat III); g. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 56,25 sampai dengan kurang dari 62,50 diberikan peringkat CC+ (Cukup tingkat I); h. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 50,00 sampai dengan kurang dari 56,25 diberikan peringkat CC (Cukup tingkat II); i. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 43,75 sampai dengan kurang dari 50,00

diberikan peringkat CC- (Cukup tingkat III); j. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 37,50 sampai dengan kurang dari 43, 75 diberikan peringkat DD+ (Kurang tingkat I); k. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 31 ,25 sampai dengan kurang dari 37,50 diberikan peringkat DD (Kurang peringkat II); dan l. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 25 sampai dengan kurang dari 31 ,25 diberikan peringkat DD- (Kurang tingkat III).

Fenomena yang berkaitan dengan Akuntabilitas adalah hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah tahun 2016 menyebutkan, Pemkot Cimahi memperoleh nilai 50,27 atau predikat “CC”. Pelaksana Tugas Wali Kota Cimahi Sudiarto mengatakan, penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya. Dia mengakui, atas penilaian tersebut, Pemkot Cimahi masih perlu mendapat perhatian dan perbaikan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sejumlah perbaikan telah dianalisa. Menurut Sudiarto, Dokumen-dokumen perencanaan kinerja RPJMD dan renstra pada masing-masing SKPD belum sepenuhnya dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang relevan dan terstruktur.

<http://m.inilahkoran.com/berita/bandung/66877/akuntabilitas-dapat-nilai-cc-pemkot-cimahi-optimalkan-sakip>

Dari fenomena tersebut berkaitan dengan dimensi yang dikemukakan oleh Dadang Sadeli yaitu tidak sesuai dengan dimensi Akuntabilitas keuangan berisi penilaian kinerja keuangan yang mana dalam dimensi tersebut harus berisi pengungkapan penilaian kinerja keuangan dari aspek ekonomis, efisien dan efektivitas.

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berperan penting pada organisasi pemerintah. Sumber daya manusia adalah pengelola dan memiliki tanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan Negara (Luh Kadek & Ni Luh Gede:2015). Oleh karena itu, dalam organisasi pemerintahan sangat dibutuhkan SDM yang kompeten dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian bagaimana suatu Pemerintah Daerah dapat menciptakan *good governance* dan *clean goverment* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman atau penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar.

Ketidakhahaman aparat pemerintah daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjadikan pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil pasal 10 yang menyebutkan bahwa dalam upaya peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dalam jabatan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Latifatul Yaswat (2015) mengenai “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah” hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. dan dari penelitian yang dilakukan Natak Riswanto (2016) mengenai “Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember” hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember semakin baik.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN DAMPAKNYA PADA KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”** (survey pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi)

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dengan penjelasan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka perlu adanya batasan ruang lingkup untuk mempermudah pembahasan agar masalah yang diteliti memperoleh kejelasan, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi.
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi.
3. Bagaimana Kinerja Keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi.
4. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi.
5. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi.
6. Seberapa besar pengaruh sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi.

7. Seberapa besar pengaruh sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan serta dampaknya terhadap kinerja keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dari penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi.
3. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan serta dampaknya terhadap kinerja keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk dapat dijadikan sumbangan ilmu untuk mendukung ilmu akuntansi. Khususnya pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan dampaknya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

Kegunaan praktis dari hasil penelitian diharapkan akan berguna untuk berbagai pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya mengenai kompetensi sumber daya manusia dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan dampaknya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- b. Hasil penelitian ini juga akan melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan dan informasi dalam mengambil kebijakan penempatan sumber daya manusia yang kompeten dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan yang nantinya berdampak pada kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Bagi Instansi Pendidikan

Dapat digunakan sebagai alat pertimbangan, acuan, dan referensi tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan dampaknya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan memacu pada penelitian yang lebih baik.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi yang berlokasi di jalan Raden Demang Hardjakusumah, Blok Jati, Cihanjuang, Kota Cimahi, Jawa Barat. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai objek yang diteliti maka penulis melaksanakan penelitian pada bulan Maret sampai dengan selesai.

